

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Organisasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian

(Studi Empiris Kementerian / Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV Periode 2020 - 2022)

Dewi Ratnasari¹, Istianingsih Sastrodiharjo², Gilbert Rely³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹²³

dewi.bdkjakarta@gmail.com¹, istianingsih@dsn.ubharajaya.ac.id²,
gilbertrely@gmail.com³



Sejarah Revisi Artikel :
Received on 28 Mei 2024
1st Revision on 29 Mei 2024
Accepted on 10 Juli 2024

Doi :
<https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i3.43>

Ciptaan disebarluaskan dibawah :



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak : Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas organisasi, dan kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh transparansi, akuntabilitas organisasi, dan kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022.

Metodologi : Metode yang digunakan adalah pengumpulan data secara dokumentasi dan olah data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian : asilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap capaian nilai kinerja anggaran, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : **Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, Capaian Kinerja Anggaran.**

1. Pendahuluan

Tata kelola yang baik adalah pendekatan berorientasi konsep untuk pengembangan sektor publik. Selain itu, ini berfungsi sebagai peraturan negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang diarahkan pada pengembangan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang efektif, transparan, dan berwibawa (Mardiasmo 2019). Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan pembaruan fundamental dan perubahan dalam sistem administrasi pemerintah. Aspek kunci dari reformasi birokrasi, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja (Indriana and Nasrun 2019).

Untuk memastikan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan memperkenalkan Peraturan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Peraturan ini menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Santosa and Akbar 2021) IKPA, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai alat untuk menilai kualitas kinerja anggaran belanja di Kementerian/Lembaga, berfokus pada kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Awalnya, pemrosesan data IKPA dilakukan secara manual pada tahun 2018, menimbulkan risiko kehilangan data (Utomo 2022) Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2018, pemrosesan data IKPA diintegrasikan ke dalam Aplikasi OMSPAN. Perkembangan dan tantangan lebih lanjut, seperti pengenalan indikator baru seperti Validasi Data Output pada tahun 2020, diikuti (Kuntadi and Puspita 2022).

untuk mendapatkan predikat kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, nilai IKPA minimal harus mencapai 89. Namun, pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, tidak semua satker memiliki nilai di atas 89 untuk periode 2020-2022. Data menunjukkan bahwa jumlah satker dengan nilai IKPA di atas 89 meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, namun masih belum mencapai target 100% satker dengan nilai minimum 89 (Santosa and Akbar 2021).

Masalah persisten skor IKPA yang rendah memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara transparansi, akuntabilitas, dan kinerja anggaran (Saraswati and Suhartini 2022 ; Tarima and Jamaluddin 2022 ; Nata and Putra 2023) Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus menilai dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan, sebagaimana diukur oleh IKPA, di kementerian/lembaga dalam pengaturan IV Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, melakukan penelitian ini menjadi sangat penting. Transparansi memainkan peran penting dalam keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan keuangan, memungkinkan pemantauan publik (Mardiasmo 2019).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan anggaran pada setiap kementerian/lembaga, karena keduanya dapat mendorong semangat kerjasama, membuka birokrasi, dan membangun hubungan yang harmonis dalam organisasi serta menciptakan saling kepercayaan yang pada akhirnya akan menghasilkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Saraswati and Suhartini 2022) Akuntabilitas, sebagai kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kepada pemberi amanah, juga ditekankan dalam reformasi sektor publik untuk menjamin efisiensi dan efektivitas (Tarima and Jamaluddin 2022) Pentingnya akuntabilitas horizontal dalam lembaga sektor publik juga ditekankan, yang menekankan tanggung jawab kepada rekan sejawat selain tanggung jawab vertikal kepada atasan (Mardiasmo 2019).

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan juga dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena belum ada penelitian yang secara langsung menguji pengaruhnya terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022 (Afif and Mulyani 2016). Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai penyusunan laporan keuangan yang didukung oleh kompetensi staf akuntansi sehingga dapat memenuhi keinginan para pemakai laporan keuangan (Mulyani, 2019). Dengan belum adanya penelitian sebelumnya yang menguji secara langsung pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan

terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

1.1 Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang akan ditangani adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi mempengaruhi pencapaian nilai-nilai kinerja pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga dalam pengaturan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022.?
2. Apakah akuntabilitas organisasi berdampak pada pencapaian skor kinerja pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga dalam pengaturan IV Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022.?
3. Apakah kualitas laporan keuangan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga dalam pengaturan IV Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022.?

2. Kajian Teori

2.1 Teori Legitimasi

Lembaga/kementerian pemerintah dituntut untuk memastikan kinerja yang optimal untuk menetapkan diri sebagai entitas yang kompeten dan dapat diandalkan di mata masyarakat umum. Legitimasi ditentukan oleh komitmen organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat; kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan organisasi dianggap tidak sah, yang mengarah pada dampak sosial dalam masyarakat (Dowling and Pfeffer 1975). Lembaga Pemerintah/Kementerian harus memberikan kinerja yang optimal agar organisasi yang dipimpinnya diakui berkompeten dan dapat dipercaya masyarakat. Legitimasi diartikan sebagai kepatuhan organisasi terhadap pemenuhan harapan masyarakat. Organisasi akan dianggap tidak sah, apabila gagal dalam pemenuhan harapan masyarakat, dengan dampaknya berupa dikenakan sanksi sosial di tengah masyarakat (Ghozali and Chariri 2018).

Tindakan organisasi harus selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku untuk mengumpulkan dukungan dan legitimasi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga pemerintah harus memasukkan teori legitimasi ke dalam operasinya, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan diinformasikan oleh analisis komprehensif kebutuhan masyarakat (Dowling and Pfeffer 1975).

2.2 Teori Keagenan

Teori agensi menggali dinamika antara dua entitas, di mana satu berfungsi sebagai prinsipal dan yang lainnya sebagai agen (Lesmono and Siregar 2021). Teori ini menjelaskan hubungan prinsip-agen, memberdayakan kepala sekolah untuk membuat keputusan penting untuk masa depan organisasi dan mendelegasikan tanggung jawab kepada agen (Kumalasari and Sudarma 2018).

Penerapan teori keagenan meluas ke sektor publik, terutama di dalam Kementerian/Lembaga Negara. Dalam lingkungan demokratis, ada hubungan keagenan antara rakyat dan pemerintah, atau antara badan pemerintah daerah dan pusat (Lesmono and Siregar 2021). Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mengalokasikan anggaran kepada masing-masing Kementerian/Lembaga atau otoritas lokal sesuai dengan peraturan yang relevan, mengharuskan akuntabilitas dari unit kerja kepada administrasi pusat. Anggaran berfungsi sebagai cetak biru keuangan penting untuk pemberian layanan publik. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mewujudkan perjanjian keuangan antara Pemerintah dan DPR, yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat (Hendrastuti and Harahap 2023). APBN adalah instrumen yang mencerminkan pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai dengan uang.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat pemantauan yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kemanjuran belanja anggaran di Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari tiga aspek inti, IKPA mengevaluasi kualitas perencanaan anggaran,

pelaksanaan, dan hasil, meneliti keselarasan antara rencana anggaran dan pelaksanaannya, kapasitas unit operasional untuk merealisasikan anggaran, dan pencapaian hasil yang diproyeksikan.

Nilai IKPA dikategorikan berdasarkan rentang tertentu: sangat baik jika nilai IKPA ≥ 95 , baik jika $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$, cukup jika $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$, dan kurang jika nilai IKPA < 70 . Penghitungan nilai IKPA dilakukan dengan menjumlahkan nilai setiap indikator berdasarkan bobot masing-masing. Proses penghitungan dilakukan secara elektronik berdasarkan data keuangan satuan kerja.

Nilai IKPA digunakan untuk monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, serta dapat menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang telah mencapai kinerja yang baik. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan percepatan dan kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2.3 Transparansi

Transparansi di ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan terkait. Ini memerlukan penyediaan data yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan pandangan transparan tentang kebijakan, perumusan, implementasi, dan hasil selanjutnya (Azhar 2015 ; Mardiasmo 2019).

Metrik transparansi mengukur tingkat pengungkapan informasi oleh entitas pemerintah mengenai kegiatan mereka. Beberapa indikator transparansi meliputi: (Adiputra, Utama and Rossieta 2018)

1. Kemudahan menemukan situs web Unit Kerja Pemerintah Daerah melalui pencarian Google sederhana.
2. Aksesibilitas data keuangan dan non-keuangan di situs web Unit Kerja pemerintah.

3. Ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat diunduh dalam berbagai format.
4. Penyediaan data keuangan dan non-keuangan historis di situs web Unit Kerja pemerintah.

Nilai indikator transparansi dapat berkisar dari minimal 1 hingga maksimal 4, tergantung pada jumlah indikator yang terpenuhi. Ini menggambarkan tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Ini melibatkan pemaparan, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi yang diperlukan, serta memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai principal. Konsep akuntabilitas menekankan bahwa setiap aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat direalisasikan melalui pengelolaan dokumen yang efektif sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan (Laoli 2019 ; Purnomo and Putri 2018).

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencakup beberapa aspek :

1. Akuntabilitas Keuangan: Melibatkan pertanggungjawaban terhadap integritas keuangan, pengangkatan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Manfaat: Menekankan pada pencapaian tujuan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan efektivitas penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur.
3. Akuntabilitas Prosedural: Berfokus pada pertanggungjawaban terhadap prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mempertimbangkan moralitas, etika, kepastian hukum, dan keputusan politis.

Akuntabilitas instansi pemerintahan melibatkan memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atas kinerja dan tindakan mereka kepada pihak yang berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Ini melibatkan pemahaman oleh semua instansi pemerintah, badan, dan lembaga negara di tingkat pusat dan daerah terhadap cakupan akuntabilitas mereka masing-masing ([Firmansyah, Sapiri and Setiawan 2018](#)).

Indikator akuntabilitas diukur melalui beberapa metrik, termasuk :

1. Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), dengan diberikan rating berdasarkan kriteria tertentu.
2. Ketersediaan Pelaporan Kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh MenPANRB, yang juga dievaluasi berdasarkan rating tertentu.

Nilai indikator akuntabilitas berkisar dari minimal 1 hingga maksimal 4, tergantung pada kriteria yang terpenuhi. Ini mencerminkan tingkat kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan atas kinerja mereka kepada masyarakat ([Dwi, Harpanto and Fahrizal 2015](#)).

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebuah pemerintahan menjadi cerminan kualitasnya, tergantung pada seberapa bergunanya informasi yang disajikan bagi pengguna serta bagaimana penyusunan laporannya sesuai dengan kerangka konseptual dan prinsip dasar akuntansi ([Afif and Mulyani 2016](#)). Kualitas laporan keuangan ini menjadi indikator sehat atau tidaknya pemerintahan tersebut. Pemerintahan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas tanpa adanya penyimpangan, yang mana laporan tersebut menjadi alat ukur bagi para pemakai dalam mengukur kualitas pemerintahan ([Mulyani 2019](#)).

Kualitas laporan keuangan diukur melalui sejumlah indikator, salah satunya adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ([Adiputra, Utama and Rossieta 2018](#)). Opini tersebut, seperti WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan material dalam pengelolaan keuangan

pemerintahan, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut. Namun, opini lain seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau TW (Tidak Wajar) menunjukkan adanya kesalahan material yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi faktor penting dalam menilai kesehatan dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

2.6 Penelitian Terdahulu

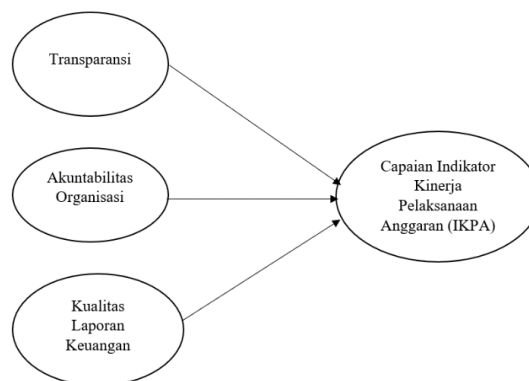
1. [\(Harnovinsah and Erlina 2020\)](#) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan supervisi terhadap pelaksanaan keuangan berkonsep Value for Money pada 43 satuan kerja daerah di Provinsi DKI Jakarta. Mereka menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SEM-PLS dan menemukan bahwa akuntabilitas dan supervisi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan keuangan, sementara transparansi tidak berpengaruh.
2. [\(Anggraini, Heriningsih and Widyastuti 2021\)](#) memeriksa pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan supervisi terhadap pelaksanaan keuangan berkonsep Value for Money pada 21 Badan Usaha Milik Desa di Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda-SPSS dan menunjukkan bahwa transparansi dan supervisi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan keuangan.
3. [\(Pramudiati, Fachrunnisa and Kusmawati 2023\)](#) melakukan penelitian serupa terhadap 24 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan supervisi berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money.
4. [\(Kuntadi and Puspita 2022\)](#) melakukan tinjauan pustaka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga tanpa melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel bebas.
5. [\(Tarima and Jamaluddin 2022\)](#) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Samarinda

dan menemukan pengaruh positif signifikan dari ketiga variabel tersebut terhadap kinerja anggaran.

6. (Saraswati and Suhartini 2022) meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money dengan memediasi komitmen organisasi pada karyawan di BPKAD Jawa Timur.
7. (Nata and Putra 2023) memeriksa pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran pada instansi pemerintah di Kota Denpasar dan menemukan pengaruh positif signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap kinerja anggaran.
8. (Utami and Haryati 2023) meneliti pengaruh karakteristik tujuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja anggaran dengan memediasi komitmen organisasi pada pegawai di BPKPD Kabupaten Pamekasan.
9. (Utami, Wahyuni and Mansawanc 2022) melakukan tinjauan pustaka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penganggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia tanpa melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel bebas.
10. (Indriana and Nasrun 2019) meneliti pengaruh good governance terhadap kinerja keuangan pada kantor daerah Kabupaten Pangkep dan menemukan pengaruh positif dari good governance terhadap kinerja keuangan.

Semua penelitian tersebut belum memasukkan variabel kualitas laporan keuangan sebagai fokus penelitian, sehingga ada kebutuhan untuk mengisi celah tersebut dalam penelitian selanjutnya.

2.7 Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh transparansi, akuntabilitas organisasi, dan kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) merupakan topik penting dalam penelitian terkait manajemen keuangan pemerintah. Transparansi, yang mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Ini karena dalam penganggaran berbasis kinerja, transparansi menjadi ukuran penting dalam menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Selain itu, akuntabilitas organisasi juga memainkan peran penting dalam mencapai nilai IKPA yang baik, karena pengelolaan keuangan yang jujur dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi merupakan ciri pengelolaan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai capaian IKPA, karena laporan keuangan yang baik menunjukkan tingkat pengungkapan yang memadai dan pemenuhan standar yang berlaku, yang mengindikasikan kinerja pengelolaan keuangan yang optimal.

Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas organisasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas, yang tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik, yang berdampak pada kinerja pengelolaan anggaran yang optimal.

dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas organisasi, dan kualitas laporan keuangan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mencapai nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan situs web kantor kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Perbendaharaan Jakarta IV. Variabel independen meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel dependen adalah

nilai capaian kinerja pelaksanaan keuangan (IKPA) pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022 (Ghozali 2018).

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja (Satker) pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022 sebanyak 252. Sampel sebanyak 40 Satker dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pagu anggaran yang rendah, sedang, besar, dan jumbo (Ghozali 2018 ; Siregar 2014).

Data yang digunakan adalah data kuantitatif terkait transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, dan kinerja keuangan, yang diolah menggunakan perangkat statistik Eviews 12. Data tersebut berasal dari laporan keuangan tahunan Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022, serta literatur dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, skripsi, artikel, maupun berita (Ghozali 2018 ; Arikunto 2016).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah dioperasionalkan, seperti IKPA sebagai variabel dependen dan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel independen. Skala pengukuran untuk setiap variabel telah ditetapkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan, misalnya skala pengukuran untuk transparansi berdasarkan indikator jumlah klik pada situs web Satker (Ghozali 2018 ; Arikunto 2016 ; Siregar 2014).

(Ghozali 2018) menggarisbawahi pentingnya analisis data sebagai langkah krusial dalam penelitian untuk mendapatkan informasi relevan dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode analisis data meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa maksud untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Arikunto 2016). Metode ini mencakup standar deviasi, nilai rata-rata, varians, dan rentang statistik untuk memberikan gambaran keseluruhan dari sampel yang dikumpulkan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tujuan dari serangkaian uji ini adalah untuk memastikan kevalidan dan keandalan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varian residual dalam model regresi tidak berbeda secara signifikan antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali 2018).

Selanjutnya, penelitian ini menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, yang memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian IKPA. Penelitian ini memilih model regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan persamaan regresi yang tepat (Ghozali 2018).

Terakhir, penelitian ini juga melakukan uji koefisien determinasi dan uji simultan. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Sementara itu, uji statistik F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari serangkaian uji ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini (Ghozali 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022. Menggunakan data sekunder dari nilai IKPA dan laporan keuangan tahunan Satuan Kerja (Satker) dari 2018 hingga 2022, penelitian ini menerapkan metode analisis kuantitatif data panel dengan Eviews 12. Analisis data bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan dan menyimpulkan temuan dari penelitian tersebut.

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil outer loading dalam Smart PLS mengacu pada nilai koefisien regresi (loading) antara variabel indikator (variabel laten) dengan variabel laten yang lebih tinggi dalam model struktural. Ini menggambarkan seberapa kuat hubungan antara variabel indikator dengan variabel laten yang mereka wakili. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Penelitian

	Y	X1	X2	X3
Mean	90.54233	2.700000	2.475000	0.750000
Median	92.07000	2.000000	2.000000	1.000000
Maximum	99.56000	4.000000	3.000000	1.000000
Minimum	70.86000	2.000000	2.000000	0.000000
Std. Dev.	6.475211	0.957939	0.501468	0.434828
Skewness	-0.952036	0.628971	0.100125	-1.154701
Kurtosis	3.460387	1.395604	1.010025	2.333333
Jarque-Bera	19.18723	20.78251	20.00050	28.88889
Probability	0.000068	0.000031	0.000045	0.000001
Sum	10865.08	324.0000	297.0000	90.00000
Sum Sq. Dev.	4989.475	109.2000	29.92500	22.50000
Observations	120	120	120	120

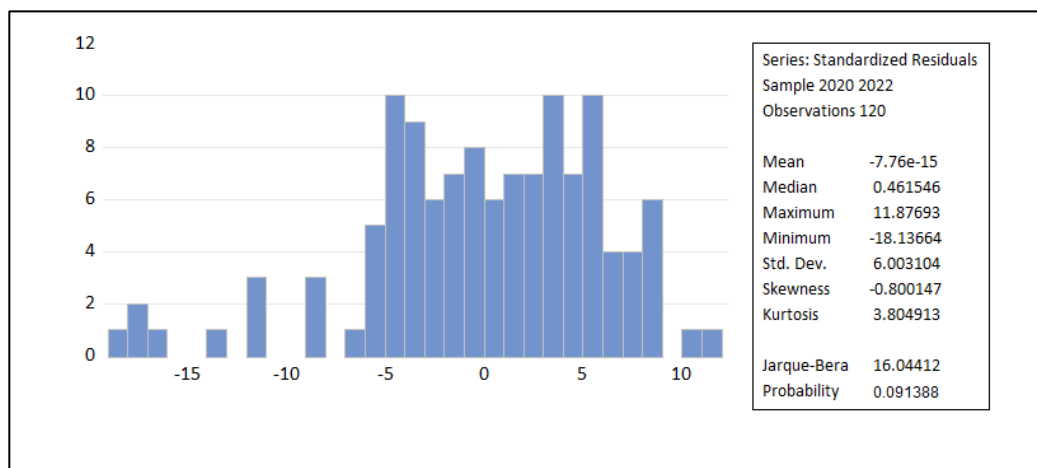
Sumber: Data primer evIEWS12, 2024

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa nilai IKPA dan data laporan keuangan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022, dengan total 40 satker. Metode analisis kuantitatif data panel digunakan dengan bantuan software Eviews 12. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata capaian IKPA sebesar 90.54, menunjukkan performa keuangan yang baik. Variabel transparansi memiliki rata-rata 2.7, masih perlu peningkatan, sementara akuntabilitas rata-ratanya 2.475, menandakan masih ada ruang untuk peningkatan. Kualitas laporan keuangan sebagian besar memiliki opini BPK non-WTP.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah model regresi variabel dependen dan independen berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera, yang merupakan metode statistik untuk mengevaluasi distribusi data. Menurut (Ghozali 2018), uji Jarque-Bera melibatkan asimptotis dan berdasarkan residual Ordinary Least Square (OLS). Kriteria untuk uji ini adalah jika probabilitas Jarque-Bera (JB) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas
Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2024

Hasil uji normalitas menggunakan Eviews 12 menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,091388, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model pada penelitian ini berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (Hasil Olahan Eviews 12, 2024).

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model penelitian. Ketika tidak ada korelasi antar variabel independen, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat adalah baik. Deteksi multikolinearitas antar variabel dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 (<10), maka tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai VIF
1	Transparansi	1.385
2	Akuntabilitas	1.268
3	Kualitas Laporan Keuangan	1.105

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, seperti yang terlihat dalam Tabel 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel (Diolah peneliti, 2024).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model penelitian. Ketika tidak ada korelasi antar variabel independen, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat adalah baik. Deteksi multikolinearitas antar variabel dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 (<10), maka tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.440.058	Prob. F(3,116)	0.2347
Obs*R-squared	4.308.677	Prob. Chi-Square(3)	0.2300
Scaled explained SS	5.646.598	Prob. Chi-Square(3)	0.1301

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2024

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, seperti yang terlihat dalam Tabel 3. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel (Diolah peneliti, 2024).

Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ dalam model regresi linier (Ghozali 2018). Dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW test).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson Stat	1.020
--------------------	-------

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2024

Hasil uji autokorelasi, seperti tercantum dalam Tabel 4.4, menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.020. Kriteria yang digunakan adalah $1 < DW < 3$ (Ghozali 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ini (Hasil Olahan Eviews 12, 2024).

4.3 Pemilihan Model Penelitian

Dalam pemilihan model estimasi regresi, dilakukan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model yang paling tepat antara fixed effect dan common effect, serta antara fixed effect dan random effect. Uji Chow bertujuan untuk membandingkan model fixed effect dan common effect, dengan hipotesis nol (H_0) bahwa common effect dan hipotesis alternatif (H_1) bahwa fixed effect. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa probabilitas pada cross-section Chi-Square lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menyiratkan bahwa fixed effect model lebih tepat digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.202.667	-33,129	0.2318
Cross-section Chi-square	45.600.539	39	0.0410

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2024

Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk membandingkan fixed effect dan random effect, dengan H_0 sebagai random effect dan H_1 sebagai fixed effect. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas Chi-Square $0,0358 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, mengindikasikan bahwa fixed effect model lebih tepat.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.374.391	7	0.0358

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2023

Hasil dari kedua uji menunjukkan bahwa metode yang paling tepat adalah fixed effect model. Analisis regresi juga menunjukkan bahwa variabel transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan memiliki koefisien yang signifikan (Hasil Olahan Eviews 12, 2024).

4.4 Hasil Analisis Uji Hipotesis dan Regresi

Tabel 1. Rangkuman Regresi

Variabel	Regresi	
	Koef	Nilai t
Var.Ind.		
Transparansi	0.029	2.807
Akuntabilitas	0.014	2.952
Kualitas Laporan Keuangan	0.032	2.171
Adjust R ²	0.760	
F Statistic	9.815	
Sig.	0.006	
N	120	

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2024

Tabel 7. menampilkan rangkuman hasil regresi yang dilakukan terhadap beberapa variabel, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Laporan Keuangan. Dalam tabel ini, terdapat koefisien regresi (Koef) dan nilai t untuk masing-masing variabel.

1. Untuk variabel Transparansi, koefisien regresi sebesar 0,029 dengan nilai t sebesar 2,807, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Hipotesis 1 yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap capaian nilai IKPA terbukti.
2. Variabel Akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,014 dengan nilai t sebesar 2,952, juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Hipotesis 2 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap capaian nilai IKPA terbukti.
3. Sedangkan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan, koefisien regresi sebesar 0,032 dengan nilai t sebesar 2,171, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Hipotesis 3 yang menyatakan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap capaian nilai IKPA terbukti.

Dengan demikian, hasil analisis menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi capaian nilai IKPA di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Capaian Nilai IKPA

Pembahasan dibawah ini akan membahas tentang pengaruh transparansi terhadap capaian nilai IKPA (Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran) dalam konteks pengelolaan keuangan satuan kerja (Satker). Berdasarkan hasil analisis, nilai t hitung variabel transparansi sebesar 2.807 dengan nilai signifikansi $< 0,05$, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh [\(Saraswati and Suhartini 2022 ; Tarima and Jamaluddin 2022\)](#) yang menyatakan bahwa transparansi mendukung pelaksanaan kinerja anggaran.

Penelitian lain oleh [\(Nata and Putra 2023\)](#) juga mengindikasikan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan kinerja anggaran. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara penting karena memberikan pertanggungjawaban atas setiap anggaran yang dikelola dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan tujuan untuk mencapai program pemerintah.

Selain itu, wawancara dengan pimpinan di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV juga menguatkan bahwa transparansi dalam setiap transaksi keuangan penting untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas, yang memungkinkan masyarakat dan stakeholder melihat dengan jelas kinerja pelaksanaan anggaran. Transparansi juga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Satker, karena merupakan prinsip good corporate governance. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya kepada pemangku kepentingan

untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini juga membantu dalam pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satker.

Kesimpulannya, transparansi keuangan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh Satker, karena telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia dalam rangka mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Hal ini tercermin dalam komitmen Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Capaian Nilai IKPA

Berdasar pada hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel akuntabilitas dan capaian nilai IKPA (Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran). Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, termasuk oleh (Saraswati and Suhartini 2022 ; Tarima and Jamaluddin 2022 ; Nata and Putra 2023), yang menegaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menunjukkan kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi, yang merupakan ciri dari pengelolaan keuangan yang baik. Ini melibatkan proses yang melibatkan semua pihak terkait dan penerapan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh pengelola keuangan. Wawancara dengan pimpinan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam menentukan nilai IKPA. Ini menunjukkan bahwa Satker di lingkungan tersebut harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena hal ini juga mencerminkan *good corporate governance*.

Kesimpulannya, akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan yang dapat memengaruhi capaian nilai IKPA. Semakin tinggi tingkat

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Satker, semakin baik pula capaian nilai IKPA yang dapat dicapai.

4.5.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Capaian Nilai IKPA

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA (Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran). Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria yang penting dalam memenuhi kebutuhan para pembaca laporan keuangan dan digambarkan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan.

Pengaruh positif antara kualitas laporan keuangan dan capaian nilai IKPA juga didukung oleh hasil wawancara dengan pimpinan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. Laporan keuangan yang baik, terutama yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), menunjukkan bahwa pengungkapan informasi telah sesuai dan memadai, mencerminkan kualitas yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian sebelumnya oleh (Istikomah 2017) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi capaian nilai IKPA pemerintah. Dengan demikian, semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah, semakin baik juga sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ketika Satker di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV menyusun laporan keuangan dengan baik dan mendapat opini WTP dari BPK, ini menandakan bahwa Satker telah menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini tidak hanya memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga menguntungkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan sebelumnya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi juga capaian nilai IKPA yang diperoleh Satker di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022.
2. Akuntabilitas juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Variabel akuntabilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi capaian nilai IKPA Satker, dengan semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin tinggi pula capaian nilai IKPA yang diperoleh.
3. Kualitas laporan keuangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan, semakin tinggi juga capaian nilai IKPA yang diperoleh Satker. Hal ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Satker.

Dengan demikian, ketiga faktor tersebut transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan capaian nilai IKPA Satker di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV periode 2020-2022.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian nilai IKPA. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Satker. Dengan demikian, kesadaran dan implementasi praktik-praktik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan

keuangan di Satker menjadi krusial dalam upaya mencapai kinerja keuangan yang optimal.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saran untuk Praktisi :

Satuan Kerja (Satker) disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap variabel-variabel yang telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian nilai IKPA, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Karena IKPA merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan laporan keuangan, peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan akan mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2. Saran untuk Pembuat Kebijakan:

Pemerintah diharapkan untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran oleh Satker. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, pemerintah perlu menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Satker.

3. Saran untuk Penelitian Akademik :

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
- b. Penelitian mendatang dapat memilih lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berbeda sebagai objek penelitian, dan juga memperluas rentang periode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang fenomena yang diteliti.

5.4 Implikasi Hasil Riset

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saran untuk Praktisi :

Satuan Kerja (Satker) disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap variabel-variabel yang telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian nilai IKPA, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Karena IKPA merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan laporan keuangan, peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan akan mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2. Saran untuk Pembuat Kebijakan:

Pemerintah diharapkan untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran oleh Satker. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, pemerintah perlu menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Satker.

3. Saran untuk Penelitian Akademik:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
- b. Penelitian mendatang dapat memilih lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berbeda sebagai objek penelitian, dan juga memperluas rentang periode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang fenomena yang diteliti.

6. Daftar Pustaka

- Achmad, J., & Saleh, H. "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Utara". *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2) : (2020). 105–111.
- Adiputra, I. M., Utama, S., & Rossieta, H. "Transparency of Local Government in Indonesia". *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1) : (2018). 123–138.

- Afif, M., & Mulyani, S. "Determinants Analysis The Importance of Accounting, Quality of Financial Statements, and Implementation of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) on SME Fostered by PT. Telkom TBK". *Manajemen Journal*, 2(1) : (2016). 1-7.
- Anggraini, D., Heriningsih, S., & Widyastuti. "The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance with the Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency". *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3) : (2021). 704-713.
- Arifani, Salle, & Rante. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1) : (2018). 68-81.
- Arikunto, S. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". *Rineka Cipta*. (2016).
- Azhar, P. S. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah". *Jurnal Online (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2) : (2015). 1-15.
- Batubara, Z., & Risna, R. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1) : (2020). 95-109.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior". *The Pacific Sociological Review*, 18(1) : (1975). 122-136.
- Dwi, A., Harpanto, G. S., & Fahrizal. "Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah." *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (BPK RI)*, 1(1) : (2015). 21-42.
- Firmansyah, Sapiri, M., & Setiawan, L. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar". *Accounting Journal*, 4(1) : (2018). 165-177.
- Ghozali, I. "Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos". *Universitas Diponegoro Press*. (2018).

- Ghozali, I., & Chariri, A. "Pendekatan Teori Akuntansi." *Research Policy*, 3(2) : (2018). 1–10.
- Harnovinsah, Al-Hakim, Y., & Erlina, Muda, I. "Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Budget Performance". *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 25(7) : (2020). 130–143.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. "Agency Theory: Review of The Theory and Current Research". *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1) : (2023). 1–12.
- Indriana, & Nasrun, M. "Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Equilibrium*, 8(1) : (2019). 19–26.
- Kumalasari, K. P., & Sudarma, M. "A Critical Perspective Towards Agency Theory." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4(2) : (2018). 165–329.
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2) : (2022). 1–9.
- Kuntadi, C., Wahyuni, K. E., & Mansawan, C. M. "Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(6) : (2022). 1–10.
- Laoli, V. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias". *Owner*, 3(1) : (2019). 60–69.
- Lesmono, B., & Siregar, S. "Studi Literatur Tentang Agency Theory." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2) : (2021). 203–210.
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". *Andi*, (2019).
- Mulyani, S. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Kudus". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 11(2) : (2019). 137–150.
- Nata, A. A. G. D. S. D., & Putra, C. G. B. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Instansi Pemerintah Se-Kota Denpasar". *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2(1) : (2023). 1–10.

- Pramudiati, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. "Determinants off Budget Performance Based on The Value for Money Concept". (2023). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 183–198.
- Purnomo, B. S., & Putri, C. "Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3) : (2018). 467–480.
- Sadjiarto, A. "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2) : (2000). 138-150.
- Santosa, A. B., & Akbar, R. "Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga". *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 9(4) : (2021). 15–24.
- Saraswati, N. P. A., & Suhartini, D. "Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi". *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2) : (2022). 459–464.
- Siregar, S. "Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perhitungan manual & SPSS". *Kencana*, (2014).
- Tarima, V. R., & Jamaluddin. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Samarinda." *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3) : (2022). 682–693.
- Utomo, E. S. "Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Prov. Jambi)". *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(4) : (2022). 1–10.